



# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) TAHUN 2024**

**DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKPj Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bupati Pesisir Selatan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen LKPj Tahun Anggaran 2024 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

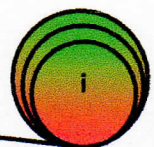
Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, **2** Januari 2025

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

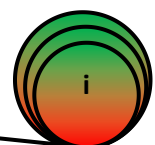


**MADRIANTO, S.Hut., M.H.**  
NIP. 19780519 200501 1 009



**DAFTAR ISI**

|                                                                                                                                                                       | Hal       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                            | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                | <b>ii</b> |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                    | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                                                                                                              | 1         |
| 1.2. Dasar Hukum.....                                                                                                                                                 | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....                                                                                                                                           | 5         |
| <b>BAB II      HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN<br/>             DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....</b>                                          | <b>6</b>  |
| 2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangka<br>Daerah.....                                                                                                  | 6         |
| 2.2 Kebijakan Strategis.....                                                                                                                                          | 16        |
| 2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir<br>Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban<br>(LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024..... | 16        |
| <b>BAB III      CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN<br/>             DAN PENUGASAN.....</b>                                                                  | <b>19</b> |
| 3.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan.....                                                                                                                  | 19        |
| 3.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas<br>Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya.....                                                                        | 20        |
| <b>BAB V      PENUTUP.....</b>                                                                                                                                        | <b>21</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kepala Daerah dan kemudian menyampaikan LKPj kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPj tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan. LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024. Pelaksanaan kebijakan

tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 – 2026.

LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2 Dasar Hukum**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Ttahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2026;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 ini adalah memberikan pelaporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan dibidang pertanian.

#### **1.3.2 Tujuan**

- a. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan melalui pengawasan dari DPRD;
- c. Tersusunnya LKPj tahun anggaran 2024 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan; dan
- d. Tersedianya informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui media massa yang tersedia di daerah.

**BAB II**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran tahun 2024 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran Rp.35.104.880.696,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.071.425.143,00 dengan tingkat realisasi mencapai 85,66%. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024**

| No    | Sasaran                               | Indikator Kinerja                    | Target Tahun 2024 | Realisasi     | Capaian (%) | Program                                                         | Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) | Anggaran Sesudah Perubahan (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian (%) | Keterangan              |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2                                     | 3                                    | 4                 | 5             | 6           | 7                                                               | 8                               | 9                               | 10                      | 11          | 12                      |
| 1.    | Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | A (89,53)         | A (88,92)     | 99,32       | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               | 19.631.319.727                  | 19.497.059.647                  | 17.050.876.320          | 87,45       | Data capaian Tahun 2023 |
| 2.    | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah  | Nilai Kematangan Inovasi Dinas       | 100               | 90            | 90,00       | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               | 51.163.832                      | 60.571.082                      | 54.117.150              | 89,34       |                         |
| 3.    | Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan     | Nilai PDRB Sektor Pertanian          | 3.10 Triliyun     | 3,05 Triliyun | 98,39       | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | 652.867.611                     | 936.389.611                     | 817.743.484             | 87,33       | Data capaian Tahun 2023 |
|       |                                       |                                      |                   |               |             | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | 3.534.679.526                   | 3.618.429.526                   | 2.342.645.966           | 64,74       |                         |
|       |                                       |                                      |                   |               |             | Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 519.250.000                     | 632.472.830                     | 516.322.320             | 81,64       |                         |
|       |                                       |                                      |                   |               |             | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | 236.000.000                     | 243.358.000                     | 178.831.620             | 73,48       |                         |
|       |                                       |                                      |                   |               |             | Penyuluhan Pertanian                                            | 9.529.600.000                   | 10.116.600.000                  | 9.110.888.283           | 90,06       |                         |
| Total |                                       |                                      |                   |               | 95,90       |                                                                 | 34.154.880.696                  | 35.104.880.696                  | 30.071.425.143          | 85,66       |                         |

*Sumber : Bagian Perencanaan dan Pelaporan*

Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Dalam Dokumen anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                              | TARGET                                                       | REALISASI                                                    | PERMASALAHAN      | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                            | 8                                                            | 9                 | 10                           | 11                            |
| 1  | Pertanian           | Dinas Pertanian            | - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024<br>- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                       | PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI (%)<br>KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI<br>PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%)<br>JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS) | 20,00<br>0 Delay Pelaporan<br>91%-100% (Sangat Baik)<br>1,00 | 20,00<br>0 Delay Pelaporan<br>91%-100% (Sangat Baik)<br>1,00 | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 1  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)                                                                                                                                                                                | 47,00                                                        | 47,00                                                        | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 1  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                                                                                          | 4,00                                                         | 4,00                                                         | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 2  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                                     | 1,00                                                         | 1,00                                                         | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 3  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                                                                 | 1,00                                                         | 1,00                                                         | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 4  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaksi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaksi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaksi Kinerja SKPD (Laporan)                                                                     | 4,00                                                         | 4,00                                                         | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 5  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                                                                                     | 60,00                                                        | 60,00                                                        | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 2  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)                                                                                                                                                                                                    | 20,00                                                        | 20,00                                                        | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 6  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                                                                                | 178,00                                                       | 178,00                                                       | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 7  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                                                                                   | 1,00                                                         | 1,00                                                         | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 8  |                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                                                                                   | 1,00                                                         | 1,00                                                         | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN      | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4         | 5                                                                  | 6                                                                                                | 7      | 8         | 9                 | 10                           | 11                            |
| 3  |                     |                            |           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             | Persentase tertibnya penatausahaan barang milik daerah SKPD (%)                                  | 25,00  | 25,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 9  |                     |                            |           | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                     | 1,00   | 1,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 4  |                     |                            |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti (%)                                              | 25,00  | 25,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
|    |                     |                            |           |                                                                    | Persentase Dokumen Publik dan Dipublish (%)                                                      | 25,91  | 25,91     |                   |                              |                               |
|    |                     |                            |           |                                                                    | Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran (%)                                             | 25,00  | 25,00     |                   |                              |                               |
| 10 |                     |                            |           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)      | 1,00   | 1,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 11 |                     |                            |           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 1,00   | 1,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 12 |                     |                            |           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1,00   | 1,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 13 |                     |                            |           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 3,00   | 3,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 14 |                     |                            |           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 12,00  | 12,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 15 |                     |                            |           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 250,00 | 250,00    | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 16 |                     |                            |           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                   | 1,00   | 1,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 5  |                     |                            |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan (%)                        | 20,00  | -         | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 17 |                     |                            |           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 1,00   | -         | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 6  |                     |                            |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | Persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan                                       | 20,00  | 20,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 18 |                     |                            |           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12,00  | 12,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 19 |                     |                            |           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 12,00  | 12,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                        | TARGET     | REALISASI  | PERMASALAHAN      | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4         | 5                                                                                                                | 6                                                                                                                        | 7          | 8          | 9                 | 10                           | 11                            |
| 7  |                     |                            |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)                                                                  | 20,00      | 20,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 20 |                     |                            |           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)            | 1,00       | 1,00       | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 21 |                     |                            |           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)            | 160,00     | 160,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 22 |                     |                            |           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                | 60,00      | 60,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| II |                     |                            |           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                             | JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)                                                                                          | 524.579,00 | 487.867,00 | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
|    |                     |                            |           |                                                                                                                  | PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN (%)                        | 53,49      | 19,30      |                   |                              |                               |
|    |                     |                            |           |                                                                                                                  | PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (KW/HA)                                                                     | 71,47      | 57,00      |                   |                              |                               |
|    |                     |                            |           |                                                                                                                  | PERSENTASE TERNAK UNGGUL (%)                                                                                             | 29,70      | 31,15      |                   |                              |                               |
|    |                     |                            |           |                                                                                                                  |                                                                                                                          |            |            |                   |                              |                               |
| 8  |                     |                            |           | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                           | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilakukan                                                             | 12,00      | 12,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 23 |                     |                            |           | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi          | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 15,00      | 15,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 24 |                     |                            |           | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                               | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)                                                      | 15,00      | 15,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 9  |                     |                            |           | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota             | Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan Yang Dimurnikan dan dilestarikan (Jenis)                      | 6,00       | 6,00       | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
|    |                     |                            |           |                                                                                                                  | Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian (%)                                                                         | 66,25      | 66,25      |                   |                              |                               |
| 25 |                     |                            |           | Perjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                                 | Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Varietas Unggul Baru/VUB)                                   | 4,00       | 4,00       | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 10 |                     |                            |           | Penyediaan Benih/ Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain   | Persentase Ketersediaan Bibit Temak Unggul (IB) (%)                                                                      | 40,00      | 40,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 26 |                     |                            |           | Pengadaan Benih Temak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                             | Jumlah Benih Temak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Dosis)                                                | 10.000,00  | 10.000,00  | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

| NO  | URUSAN PEMERINTAHAN | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                              | TARGET                               | REALISASI                            | PERMASALAHAN      | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|-----|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                          | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                              | 7                                    | 8                                    | 9                 | 10                           | 11                            |
| III |                     |                            |           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                              | JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)<br>JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)<br>PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUN/GALUR TERNAK (%)<br>PERSENTASE PENGADUANSARAN SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAKLANJUTI (%) | 524.579,00<br>1,79<br>25,00<br>25,00 | 487.867,00<br>1,78<br>25,00<br>25,00 | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 11  |                     |                            |           | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                     | Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi dari alih fungsi (Ha)                                                                                                                                         | 22.746,10                            | 22.746,10                            | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 27  |                     |                            |           | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                    | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)                                                                                                                                             | 1,00                                 | 1,00                                 | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 12  |                     |                            |           | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                      | Persentase Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)<br>Persentase Jalan Pertanian Berkondisi Baik (%)<br>Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian Yang Berkondisi Baik (%)                                                              | 75,35<br>83,86<br>61,83              | 75,35<br>83,86<br>61,83              | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 28  |                     |                            |           | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                          | Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)                                                                                                                                                    | 9,00                                 | 9,00                                 | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 29  |                     |                            |           | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya                     | Jumlah Balai Penyuluh Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)                                                                                                                  | 1,00                                 | 1,00                                 | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 30  |                     |                            |           | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                            | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)                                                                                                                                                                  | 20,00                                | -                                    | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| IV  |                     |                            |           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                              | PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/TERNAK (%)<br>PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK DIKONSUMSI (%)                                                                        | 4,47<br>20,00                        | 4,69<br>20,00                        | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 13  |                     |                            |           | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) (%)<br>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies (%)                                                                | 4,55<br>3,33                         | 4,40<br>3,33                         | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 31  |                     |                            |           | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                         | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)                                                                                                                                                                        | 15,00                                | 15,00                                | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                             | TARGET   | REALISASI | PERMASALAHAN      | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4         | 5                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                             | 7        | 8         | 9                 | 10                           | 11                            |
| 32 |                     |                            |           | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                            | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                        | 2.445,00 | 2.445,00  | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 33 |                     |                            |           | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 15,00    | 15,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 14 |                     |                            |           | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota                                                       | Jumlah Check Point yang Aktif (Unit)                                                                                                          | 3,00     | 3,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 34 |                     |                            |           | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)                                                | 12,00    | 12,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 15 |                     |                            |           | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                            | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B (Unit)                                                               | 5,00     | 5,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
|    |                     |                            |           |                                                                                                                                          | Persentase Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang memiliki                                                                                | 75,00    | 75,00     |                   |                              |                               |
| 35 |                     |                            |           | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                   | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)                                                                                                  | 1,00     | 1,25      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 36 |                     |                            |           | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)                                                                                               | 12,00    | 12,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 16 |                     |                            |           | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                               | Jumlah Jenis Produk Hewan yang diawasi (Jenis)                                                                                                | 5,00     | 5,00      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
|    |                     |                            |           |                                                                                                                                          | Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner/NKV) (Unit)         | 1,00     | 1,00      |                   |                              |                               |
| 37 |                     |                            |           | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                              | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)                                                                                  | 1,00     | 1,25      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 38 |                     |                            |           | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                    | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                  | 1,00     | 1,25      | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| V  |                     |                            |           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                | PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)                                                                              | 20,00    | 20,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 17 |                     |                            |           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota                                                                        | Persentase Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit Tumbuhan (%)                                                                               | 20,00    | 20,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
|    |                     |                            |           |                                                                                                                                          | Luas Areal Lahan yang Dapat ditangani dari pasca bencana pertanian (Ha)                                                                       | 350,00   | 350,00    |                   |                              |                               |
| 39 |                     |                            |           | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                             | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)                  | 7.619,00 | 7.619,00  | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                           | TARGET   | REALISASI | PERMASALAHAN      | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4         | 5                                                                                   | 6                                                                                                                           | 7        | 8         | 9                 | 10                           | 11                            |
| VI |                     |                            |           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                        | JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)                                                                             | 100,00   | 130,00    | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
|    |                     |                            |           |                                                                                     | JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)                                                                    | 1,00     | 1,00      |                   |                              |                               |
| 18 |                     |                            |           | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                    | Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan | 20,00    | 20,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
|    |                     |                            |           |                                                                                     | Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)                                      | 35,24    | 35,24     |                   |                              |                               |
|    |                     |                            |           |                                                                                     | Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)                                                             | 1.110,00 | 439,00    |                   |                              |                               |
|    |                     |                            |           |                                                                                     | Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)                                                             | 83,33    | 83,33     |                   |                              |                               |
|    |                     |                            |           |                                                                                     | Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)                                                          | 81,50    | 81,50     |                   |                              |                               |
| 40 |                     |                            |           | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa        | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)                         | 15,00    | 15,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 41 |                     |                            |           | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)                                       | 1.110,00 | 439,00    | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |
| 42 |                     |                            |           | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)                                                    | 38,00    | 38,00     | Tidak Ada Masalah | -                            | -                             |

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja**

**i. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 99,32%)**

Yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Perubahan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Perubahan Renja serta kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perubahan Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp.19.497.059.647,00 dengan realisasi anggaran Rp.17.050.876.320,00 atau sebesar 87,45%.

**B. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator kinerja yaitu:**

**ii. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 90%).**

Yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Perubahan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Perubahan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perubahan Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi,

ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp.60.571.082,00 dengan realisasi anggaran Rp.54.117.150,00 atau sebesar 89,34%.

**C. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan, dengan indikator kinerja yaitu:**

**iii. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) (Triliyun)**

**(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 98,39%)**

Yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Perubahan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Perubahan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perubahan Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

**a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini bertujuan untuk ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian, persentase kelompok tani yang menerapkan sop (standar operasional prosedur) budidaya pertanian, produktivitas pertanian per hektar per tahun dan persentase ternak unggul. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.936.389.611,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.817.743.484,00 atau sebesar 87,33%.

**b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini bertujuan pembangunan prasarana pertanian. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.3.618.429.526,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.342.645.966,00 atau sebesar 64,74%.

**c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini bertujuan menekan perkembangan dan penyebaran penyakit hewan menular strategis dan pengawasan hewan dan

produk hewan. Nilai nilai pagu anggaran sebesar Rp.632.472.830,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.516.322.320,00 atau sebesar 81,64%.

**d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini bertujuan perlindungan produksi pertanian terhadap serangan OPT dan Bencana Pertanian. Adapun capaian kinerja program ini adalah persentase pengendalian dan pengendalian bencana pertanian sampai 100 (seratus) persen. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.243.358.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.178.831.620,00 atau sebesar 73,48%.

**e) Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Kelompok Tani naik kelas sebanyak 100 (seratus) unit dan Balai Penyuluh Pertanian yang naik kelas sebanyak 1 (satu) unit. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.116.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.110.888.283,00 atau sebesar 90,06%.

**2.2 Kebijakan Strategis**

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Selama tahun 2024, Dinas Pertanian tidak ada mengeluarkan kebijakan strategis.

**2.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun anggaran 2023**

Sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.1.4.2/26/Set.DPRD/2024 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, untuk Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai mana pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3  
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan  
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran 2023

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17 | Dikarenakan harga sawit petani swadaya masih rendah dan jauh dari harapan petani, diminta kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir untuk melakukan upaya terbentuknya kelembagaan petani kebun sawit swadaya agar dapat dilakukan kemitraan dengan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Pesisir Selatan | <p>Harga kelapa sawit swadaya masih rendah, perlu dibentuknya kelembagaan petani untuk difasilitasi kemitraan dengan perusahaan perkebunan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Pertanian melalui bidang perkebunan sudah memfasilitasi pembentukan lembaga pekebun dalam bentuk Koperasi, terutama untuk menunjang kegiatan peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana perkebunan. Total Lembaga Pekebun yang sudah difasilitasi menunjang dua kegiatan ini adalah 15 Koperasi.</li><li>2. Dari 15 Koperasi ini belum ada yang bermitra dengan perusahaan, Dinas Pertanian sudah melakukan fasilitasi pertemuan antara lembaga pekebun dengan PKS namun belum ada dari PKS yang bersedia bermitra dengan Koperasi. Hal ini disebabkan karena :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Keputusan kemitraan diputuskan oleh kantor pusat perusahaan, upaya yang sudah dilakukan Dinas Pertanian melalui pertemuan dengan perwakilan perusahaan dan surat Bupati tidak mendapat respon dari perusahaan.</li><li>b) Lahan koperasi tidak satu hamparan, dalam regulasi Permentan No 13 Tahun 2024 lahan untuk menjalin kemitran pekebun swadaya dengan PKS lahan satu hamparan, untuk memudahkan kontrol Tandan Buah Segar (TBS) yang dikirimkan ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit).</li></ol></li><li>3. Regulasi Permentan No 13 Tahun 2024 pengganti Permentan 01 Tahun 2018 yang menjadi dasar dalam penetapan harga tandan buah segar sudah mengatur dengan rinci terkait kemitraan pekebun swadaya dengan PKS. Dalam regulasi ini diberikan wewenang kepada inspektorat, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi</li></ol> |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | untuk melakukan pengawasan. Perlu evaluasi terhadap izin usaha yang dikeluarkan oleh OPD yang diberikan kewenangan agar PKS bisa taat terhadap regulasi terutama kewajiban untuk kemitraan dengan PKS untuk mendapatkan harga lebih baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 18 | Diminta kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertanian kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Alsintan bantuan Pemerintah melalui Kelompok Tani agar tidak dikomersilkan tetapi dipergunakan untuk keperluan pengelolaan lahan Kelompok Tani | Bantuan alat dan mesin pertanian yang diserahkan ke Kelompok Tani adalah berupa hibah barang. Dinas Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan alsintan tersebut ditingkat Kelompok Tani dan Petani yang dilakukan oleh Bidang terkait maupun oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Jika ditemukan penggunaan dan pemanfaatan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Dinas Pertanian akan melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani tersebut. Jika tidak bisa lagi dilakukan pembinaan, maka alat dan mesin pertanian akan ditarik dan direalokasikan ke Kelompok Tani lainnya yang membutuhkannya agar azas manfaat alat dan mesin pertanian tersebut tercapai.                                                                                                       |  |
| 19 | Mengingat bantuan pertanian berbasis kelompok maka diminta pada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk memfasilitasi pembentukan/revitalisasi Kelompok Tani yang tidak aktif agar terjadi pemerataan pengalokasian bantuan bidang pertanian   | Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Tani harus melalui proses yang telah diatur dalam Permentan tersebut diatas.<br>Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah menaikkan Kelas Kemampuan Kelompok Tani sebanyak 100 kelompok Tani dari kelas pemula menjadi kelas lanjut dan kelas lanjut menjadi kelas madya dan Tahun 2024 sebanyak 123 Kelompok Tani, dengan harapan agar Kelompok Tani yang ada bisa melakukan aktivitas dengan baik dan tetap melakukan pertemuan rutin yang telah di sepakati dengan anggota. Kedepannya Kelompok Tani yang tidak aktif dapat diminimalisir dan bertahap bisa diaktifkan kembali dan bisa difasilitasi bantuan bidang pertanian. |  |

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**3.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan**

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

**3.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintahan Tingkat Di atasnya**

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Provinsi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian sebesar Rp.6.888.452.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.179.630.000 atau sebesar 89,71% Secara ringkas alokasi dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan Provinsi. Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana penyediaan air yaitu 1) Irigasi perpipaan, 2) Irigasi perpompaan, dan 3) Optimasi lahan. Besaran pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Alokasi anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2024**

| No            | Satuan Kerja                                                                         | Perangkat Daerah Pelaksana                | Pagu anggaran (Rp)   | Realisasi anggaran (Rp) | (%)          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1             | Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (Satker 08) | Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan | 6.888.452.000        | 6.179.630.000           | 89,71        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                      |                                           | <b>6.888.452.000</b> | <b>6.179.630.000</b>    | <b>89,71</b> |

Sumber: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tahun 2024

**3.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat Di bawahnya**

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 tidak memberikan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat Di bawahnya.

**3.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya**

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi yaitu seringnya dilakukan revisi DIPA dan POK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, setelah revisi DIPA dan POK telah di sahkan, sesegera mungkin didistribusikan ke Kabupaten/Kota.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan pertanian selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian berjalan optimal yang merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen masyarakat tani yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan pertanian. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pembangunan pertanian pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan pertanian pada tahun anggaran 2024 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khusus para petani/kelompok tani/gapoktan/KEP dan stakeholder yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pembangunan pertanian dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Disamping itu pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2024 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan pertanian senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua, Aamiin yarabbal alamiin.